

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2. Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis tata Hutan dan Pemanfaatan kawasan
 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perindugan dan KSDAE
 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan DAS dan RHL
 6. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan
 7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 8. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 9. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
 10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Peningkatan produktivitas hutan dan optimalisasi PNBPN sektor kehutanan	Jumlah DBH PNBPN sektor kehutanan	menghitung jumlah pendapatan Dana bagi Hasil (DBH) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan	$(\text{Realisasi PNBPN PSDH \& IUPTH} \times 16\%) + (\text{Realisasi PNBPN DR} \times 40\%)$	Dokumen Rekonsiliasi Per Triwulan dengan wajib bayar dan kementerian LHK
2	Menurunnya luas kerusakan hutan	Prosentase luas kerusakan hutan	Mengukur Luas Kerusakan lahan yang terjadi di dalam kawasan hutan	$\frac{\text{Jumlah Luas Kerusakan Hutan}}{\text{Jumlah Luas Kawasan Hutan}} \times 100\%$	1. Data Luas kebakaran Hutan 2. Data Illegal Logging 3. Data Luas kawasan Hutan
3	Berkurangnya luas lahan kritis dan terbuka	Luas lahan kritis dan lahan terbuka yang ditanami	Mengukur tutupan lahan pada lahan kritis dan terbuka yang ditanamai	Menghitung Luasan rehabilitasi hutan dan lahan yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN dan APBD) ditambah luas penanaman yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya.	1. menghitung lahan kritis provinsi kallim 2. Laporan penanaman oleh para pihak 3. Laporan pemohonan bantuan bibit penghijauan lingkungan
4	Meningkatnya peran masyarakat di dalam dan atau disekitar hutan dalam pengelolaan hutan	Jumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan	Mengukur jumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN dan APBD)serta yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya.	Menghitung jumlah jenis usaha perhutanan sosial dan kemitraan yang melibatkan masyarakat di dalam dan atau disekitar kawasan hutan yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN dan APBD)serta yang dilakukan oleh pihak swasta yaitu IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IPPKH serta pihak lainnya.	1. Data Kelompok Masyarakat yang Menjalankan Perhutanan Sosial dan Kemitraan 2. Laporan Perusahaan yang menjalin Kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
4	Bertambahnya kawasan hutan mangrove pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan	Bertambahnya tutupan pada kawasan mangrove	50 Ha	Mengukur tutupan lahan pada kawasan mangrove yang kritis	1. Data Lahan Kritis Prov. Kalimantan (Kawasan Mangrove) 2. Laporan penanaman mangrove yang dilakukan para pihak	Luasan rehabilitasi mangrove yang dilakukan Pemerintah melalui dana APBN dan APBD serta penanaman mangrove yang dilakukan oleh para pihak (swasta)	Kabid Pembinaan Perindungan Hutan